



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025



2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAAT DPRD KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhîrnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermarifaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juni 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM



RIDWAN AFANDI, S.STP., M.Eng
NIP. 19820131 200012 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRI WULAN II TAHUN BERJALAN	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	19
BAB IV PENUTUP	
5.1 Catatan Penting.....	24
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	24
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat..	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II.....	15
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Sekretariat DPRD Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting**
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan**
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut**

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program “Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” adalah 90%. Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase Pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan” adalah 38,35%, dari dari target 94%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya” adalah 46%, dari dari target 93%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran” adalah 55,57%, dari dari target 83%. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan diantaranya:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ”Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan” adalah 11,38%, dari dari target 82%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai perencanaan” adalah 53,27%, dari dari target 93%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik” adalah 19,99%, dari dari target 90%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD” adalah 46,06%, dari dari target 92%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD” adalah 4,62%, dari dari target 82%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Target kinerja sampai dengan akhir Desember 2025 dengan indikator program ”Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi” adalah 100%. Pencapaian kinerja dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana” adalah 17,47%, dari dari target 92%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Naskah Akademik;
10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan” adalah 22,94%, dari dari target 84%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
 - d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
 - f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase hasil rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti” adalah 51,14%, dari dari target 92%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
 - f. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Rata-rata tingkat keterlaksanaan

program kerja alat kelengkapan DPRD” adalah 55,66%, dari dari target 84%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - f. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase rekomendasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti” adalah 53,57%, dari dari target 85%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
14. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
- Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan II pada bulan Juni 2025 dengan indikator kegiatan ” Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi” adalah 51,33%, dari dari target 90%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Failitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Sekretariat DPRD Kota Batam

kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1		2	3	4	5	6 = $5/4*100$			
		SEKRETARIAT DPRD							
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	2	SEKRETARIAT DPRD							
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentasi terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	94 %	49 %	52,13		
4	2	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94 %	38,35 %	40,80		
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Org/bln	166 Org/bln	74,77
4	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	6 Dok	50,00
4	2	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93 %	46 %	49,46	
4	2	1	02.05	9	Penyediaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Org	7 Org	46,67
4	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 %	55,57 %	66,95	
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	75,00
4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	80,00
4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	28,57
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	25,00
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	25,00

4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dok	1	dok	50,00
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196	dok	162	dok	82,65
4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	82	%	11,38	%	13,88
4	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4	unit	0	unit	0,00
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	0	unit	0,00
4	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	unit	2	unit	25,00
4	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	0	unit	0,00
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93	%	53,27	%	57,28
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	lap	2	lap	28,57
4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	2	lap	16,67
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	6	lap	50,00
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95	%	19,99	%	21,04
4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	7	unit	25,93
4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	unit	24	unit	46,15
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	1	unit	12,50
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Percentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	92	%	46,06	%	50,07
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Org/bln	50	Org/bln	100,00
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	0,00
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	Org	7	Org	14,00
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Percentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	82	%	4,62	%	5,63

4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	lap	0	lap	0,00
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	lap	1	lap	12,50
2	4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Percentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	84	%	46,25	%	55,06
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Percentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	91	%	17,47	%	19,20
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	dok	4	dok	33,33
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18	dok	2	dok	11,11
4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	15	dok	1	dok	6,67
4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Percentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	84	%	22,94	%	27,31
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	75	dok	0	dok	0,00
4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	75	dok	40	dok	53,33
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	dok	0	dok	0,00
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	dok	0	dok	0,00
4	2	2	02.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40	dok	7	dok	17,50
4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40	dok	26	dok	65,00
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Percentase hasil rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	92	%	51,14	%	55,59
4	2	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	lap	6	lap	50,00
4	2	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	lap	3	lap	25,00
4	2	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	lap	4	lap	33,33
4	2	2	02.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	lap	2	lap	16,67
4	2	2	02.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	lap	3	lap	25,00

4	2	2	02.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	36	dok	30	dok	83,33
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	70	%	55,66	%	79,51
4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	dok	2	dok	66,67
4	2	2	02.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27	Org	27	Org	100,00
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	Org	9	Org	100,00
4	2	2	02.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18	dok	2	dok	11,11
4	2	2	02.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18	dok	13	dok	72,22
4	2	2	02.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	27	dok	5	dok	18,52
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Percentase rekomendasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	85	%	41,80	%	49,18
4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52	dok	30	dok	57,69
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	900	dok	375	dok	41,67
4	2	2	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Percentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	90	%	51,33	%	57,03
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26	dok	12	dok	46,15
4	2	2	02.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	lap	2	lap	66,67
4	2	2	02.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	dok	3	dok	25,00
4	2	2	02.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	132	dok	102	dok	77,27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

*Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II
Sekretariat DPRD Kota Batam*

No	Indikator Sasaran Sekretariat DPRD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	indeks	70	indeks	70	
2	Percentase Rancangan Produk Hukum Yang Difasilitasi Oleh DPRD	%	70	%	70	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi jumlah pegawai dan sarana atau prasarana kerja dan jumlah anggaran yang ada dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD;

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana atau prasarana yang belum lengkap dan kurangnya memadai dapat ditingkatkan agar mendukung perkembangan tugas-tugas yang ada di Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Tuntutan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas kita dituntut cepat, tepat dan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan tugas yang dijalankan. Hal ini menjadi tantangan bagi staf Sekretariat DPRD untuk memiliki respon yang baik dan juga dukungan kinerja yang didapatkan agar dalam pelaksanaannya dapat cepat dan tepat;

d. Hubungan Harmonis

Memiliki hubungan harmonis antar masing-masing bagian, sub bagian dan aparatur menjadi salah satu hal yang dibutuhkan guna terciptanya pelayanan yang baik dan prima yang dapat diberikan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

e. Lingkungan Kerja

Mempunyai lingkungan kerja yang harmonis dan adanya koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah serta adanya dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batam;

f. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan untuk dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola top down menjadi bottom up;
3. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan pada tahun berjalan serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Kebijakan Strategis yang di tetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam dalam penyelesaian permasalahan, sebagai berikut :

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan;
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

Terdapat peluang yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam yang meliputi :

- a. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi;
- b. Adanya kualitas sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas DPRD;

- d. Mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan terhadap DPRD;
- e. Melaksanakan pelatihan terkait pelayanan publik secara berkala bagi DPRD;
- f. Tersedianya ketatalaksanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

Selain peluang juga terdapat beberapa tantangan yang ada pada Sekretariat DPRD, antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Batam;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana, baik dari segi *software* maupun *hardware* dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Keterbatasan jumlah ASN yang memahami Tupoksi yang dapat mengimbangi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran honorarium di alihkan (pergeseran) ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN atas informasi dari TAPD.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semulanya dianggarkan untuk pembayaran gaji THL, setelah adanya perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan dalam sistem kepegawaian, pada Rancangan renja perubahan di alihkan (pergeseran) ke kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di anggarkan pada penambahan pagu RKPD 2025 (penambahan Sub Kegiatan).
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DED Pagar) di anggarkan pada penambahan pagu RKPD 2025 (penambahan Sub Kegiatan).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 - a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundangan-Undangan, Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- dan Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- b. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
 - c. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
 - d. Kegiatan-kegiatan tersebut, setelah di lakukan Analisis Kebutuhan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Batam, pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 semua kegiatan tersebut di anggarkan sesuai kebutuhan, dan di dapatkan pagu Rp. **135.198.407.041** (Seratus tiga puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh satu Rupiah).

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Batam

KODE		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)		SELISIH			
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
1		2	3	4	5	7	8	10	11				
		SEKRETARIAT DPRD							117.742.573.260	135.198.407.041	17.455.833.781		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							117.742.573.260	135.198.407.041	17.455.833.781		
4	2	SEKRETARIAT DPRD							117.742.573.260	135.198.407.041	17.455.833.781		
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD	100 %	94%	58.710.688.451	81.237.676.642	22.526.988.191		
4	2	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	97%	94%	14.580.974.252	21.488.321.744	6.907.347.492	
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/bulan	222 Org/bln	14.580.974.252	21.557.785.939	6.976.811.687
4	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	12 Dok	0,00	234.720.000	234.720.000
4	2	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	93%	93%	386.617.000	158.137.000	-228.480.000	
4	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	240 Paket	228.480.000	-	-228.480.000
4	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 Orang	15 Org	158.137.000	79.175.000	-78.962.000
4	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	83%	83%	2.888.898.312	3.838.594.282	949.695.970	
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	163.518.000	135.158.500	-28.359.500
4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	754.940.211	493.175.786	-261.764.425
4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	105.750.000	486.413.750	380.663.750
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	653.337.600	364.688.000	-288.649.600
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	399.636.501	409.386.501	9.750.000
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	2 Dok	261.600.000	261.600.000	0
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Lap	196 Lap	550.116.000	317.553.000	-232.563.000
4	2	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	82%	82%	797.436.119	10.497.888.491	9.700.452.372	
4	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	4 Unit	0,00	3.600.000.000	3.600.000.000

	4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	125.000.000	1.123.246.000	998.246.000
	4	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	672.436.119	5.749.829.191	5.077.393.072
	4	2	1	02.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	0	248.976.000	248.976.000
	4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai perencanaan	98%	98%	2.660.781.161	6.551.993.910	3.891.212.749
	4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Lap	7 Lap	1.992.680.400	1.992.680.400	0
	4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	264.024.000	212.037.000	-51.987.000
	4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	12 Lap	404.076.761	3.697.710.974	3.293.634.213
	4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	91%	91%	2.596.238.900	6.213.687.920	3.617.449.020
	4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	1.019.932.000	1.112.712.000	92.780.000
	4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	645.165.000	543.475.000	-101.690.000
	4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	931.141.900	4.171.872.669	3.240.730.769
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	91%	91%	33.782.669.707	33.816.383.932	33.714.225
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Org/Bln	50 Org/Bln	32.982.061.932	32.982.061.932	0
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	625.607.775	659.322.000	33.714.225
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Org	50 Org	175.000.000	175.000.000	0
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD	81%	81%	1.017.073.000	780.933.000	-236.140.000
	4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Lap	12 Lap	107.712.000	40.532.000	-67.180.000
	4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	8 Lap	909.361.000	588.565.000	-320.796.000
	2	4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase tersusun dan terintegrasi nya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi nya	Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi	65%	84%	59.031.884.809	53.960.730.399	-5.071.154.410
	4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	Persentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	91%	91%	4.459.008.107	4.011.129.800	-447.878.307
	4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dok	12 Dok	1.810.486.537	1.412.655.000	-397.831.537
	4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dok	18 Dok	1.985.712.000	1.613.337.000	-372.375.000
	4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dok	15 Dok	243.152.000	223.428.000	-19.724.000
	4	2	2	02.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		24 Dok	0	419.657.570	-	-419.657.570
	4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	83%	83%	6.109.423.000	6.520.696.000	411.273.000
	4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dok	75 Dok	1.007.000.000	688.667.000	-318.333.000

4	2	2	02.	02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dok	75 Dok	1.009.000.000	677.730.000	-331.270.000
4	2	2	02.	02	3	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dok	3 Dok	909.000.000	973.888.000	64.888.000
4	2	2	02.	02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dok	3 Dok	907.000.000	971.099.000	64.099.000
4	2	2	02.	02	5	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dok	40 Dok	1.198.423.000	810.481.500	-387.941.500
4	2	2	02.	02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40 Dok	40 Dok	1.079.000.000	1.043.879.500	-35.120.500
4	2	2	02.	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase hasil rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	Persentase hasil rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	90%	90%	2.351.569.000	2.145.110.000	-206.459.000
4	2	2	02.	03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Lap	12 Lap	352.374.000	257.907.000	-94.467.000
4	2	2	02.	03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Lap	12 Lap	222.930.000	178.875.000	-44.055.000
4	2	2	02.	03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Lap	12 Lap	352.374.000	257.907.000	-94.467.000
4	2	2	02.	03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Lap	12 Lap	352.374.000	257.907.000	-94.467.000
4	2	2	02.	03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Lap	12 Lap	134.214.000	90.459.000	-43.755.000
4	2	2	02.	03	8		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	36 Dok	0	727.827.500	727.827.500
4	2	2	02.	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	70%	70%	16.469.290.890	18.384.658.198	1.915.367.308
4	2	2	02.	04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dok	3 Dok	1.666.856.045	1.828.953.499	162.097.454
4	2	2	02.	04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Org	27 Org	1.990.234.000	1.990.234.000	0
4	2	2	02.	04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Org	9 Org	551.021.092	551.021.200	108
4	2	2	02.	04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18 Dok	18 Dok	618.600.000	306.537.000	-312.063.000
4	2	2	02.	04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dok	18 Dok	6.045.466.000	6.454.115.000	408.649.000
4	2	2	02.	04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	93 Dok	27 Dok	5.597.113.753	4.033.729.700	-1.563.384.053
4	2	2	02.	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase rekomendasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	68%	68%	11.970.035.000	11.141.532.000	-828.503.000
4	2	2	02.	05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dok	52 Dok	101.330.000	82.038.000	-19.292.000
4	2	2	02.	05	3	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	900 Dok	11.868.705.000	9.549.620.000	-2.319.085.000
4	2	2	02.	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	90%	90%	17.672.558.812	22.633.177.500	4.960.618.688
4	2	2	02.	08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26 Dok	26 Dok	5.576.423.500	9.235.053.500	3.658.630.000
4	2	2	02.	08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Lap	3 Lap	294.287.000	159.507.000	-134.780.000
4	2	2	02.	08	3	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	12 Dok	6.045.612.312	3.687.255.000	-2.358.357.312
4	2	2	02.	08	4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	110 Dok	132 Dok	5.756.236.000	5.896.619.000	140.383.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan dukungan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing- masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing- masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,


AMSAKAR ACHMAD